

BAB 1

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Bank Dunia memandang *blue economy* sebagai pendekatan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat pesisir, penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan (Rahmayanti et al., 2025). Pembangunan menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan bangsa Indonesia, untuk mendukung pembangunan ekonomi yang sebelumnya lebih berfokus pada wilayah daratan. Indonesia mulai mengarahkan dan memusatkan pembangunan ekonomi sektor kelautan. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi maritim (Dhaniswari & Rakhmagina, 2022).

Kegiatan riset dan inovasi, memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan di berbagai bidang. Kedua aspek ini menciptakan peluang untuk menghasilkan penemuan baru, mengembangkan teknologi lebih maju, serta menawarkan alternatif pemecahan terhadap berbagai persoalan yang semakin kompleks. Melalui riset yang dilakukan secara sistematis, para ilmuwan dan peneliti dapat memahami berbagai fenomena secara lebih komprehensif, mengenali tantangan yang dihadapi masyarakat, serta merumuskan gagasan solusi bersifat inovatif. Hasil inovasi yang lahir dari proses riset tersebut kemudian dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi berbagai sektor kehidupan termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi (Hidayat, 2024).

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, (2014) merupakan landasan hukum yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kelautan secara terpadu, berkelanjutan, dan terkoordinasi. Undang-undang tersebut diarahkan untuk mengatasi fragmentasi kebijakan serta memperkuat peran negara dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya serta ruang kelautan. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek koordinasi antarlembaga dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan sektor kelautan.

Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, (2014) mengalami penyesuaian ketentuan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut memperkuat landasan hukum dalam penyelenggaraan pembangunan kelautan serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konteks pembangunan daerah, pemanfaatan hasil riset dan inovasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perumusan kebijakan pengembangan ekonomi berbasis maritim.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah, (2023) memperkuat implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, (2014) memberikan kerangka bagi pemerintah daerah dalam mengelola, mengoordinasikan, serta mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan. Menurut Hidayat (2024), Peraturan Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset Dan Inovasi Di Daerah,

(2023) bertujuan untuk memperkuat peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Serta untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi di daerah guna meningkatkan daya saingnya serta kegiatan-kegiatan seperti riset, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan untuk mengisi kekosongan regulasi terkait di daerah.

Kerangka regulasi nasional telah menetapkan riset dan inovasi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan sektor maritim, keberhasilan implementasinya di tingkat daerah sangat bergantung pada kualitas tata kelola para pemangku kepentingan. Menurut Afrianto (2026) pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan aktif, koordinasi yang efektif, serta kejelasan pembagian keterlibatan di antara para aktor kunci seperti Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang), perangkat daerah di sektor maritim, perguruan tinggi, serta masyarakat pesisir. Jika kita memahami kerangka regulasi nasional, maka pada praktiknya masih terdapat kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan, rendahnya pemanfaatan hasil riset oleh pelaku usaha, serta minimnya dampak nyata terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selanjutnya, dalam rangka pengembangan ekonomi berbasis maritim tidak hanya dipandang sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam, melainkan sebagai hasil dari proses kebijakan publik yang melibatkan interaksi berbagai aktor dengan

kepentingan, peran, dan kapasitas yang beragam. Dinamika tersebut menempatkan tata kelola sebagai faktor krusial dalam menentukan keberhasilan kebijakan, terutama melalui efektivitas koordinasi antar lembaga serta tingkat keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan, mulai dari perumusan hingga evaluasi. Tantangan dalam pengembangan ekonomi maritim tidak semata-mata bersumber pada aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan keberagaman kelembagaan dan kualitas tata kelola dalam penyelenggaraan kebijakan publik (Ariadi et al., 2025).

Kota Tanjungpinang sebagai ibu kota Kepulauan Riau, memiliki posisi geografis yang strategis dalam jalur perdagangan dan pelayaran internasional karena terletak di kawasan perairan yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan. Wilayah ini juga memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar dan beragam, serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah (Apriyenson et al., 2025). Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tanjungpinang hingga saat ini masih didominasi oleh sektor jasa. Tiga sektor yang memberikan peran terbesar terhadap PDRB yaitu sektor konstruksi sebesar (27,86%), sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar (27,26%), serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar (10,51%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah lebih banyak bertumpu pada aktivitas jasa, sementara sektor produksi berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam masih belum menjadi penopang utama dalam perekonomian daerah.

Tabel 1.1 Nilai Tambah PDRB Kota Tanjungpinang

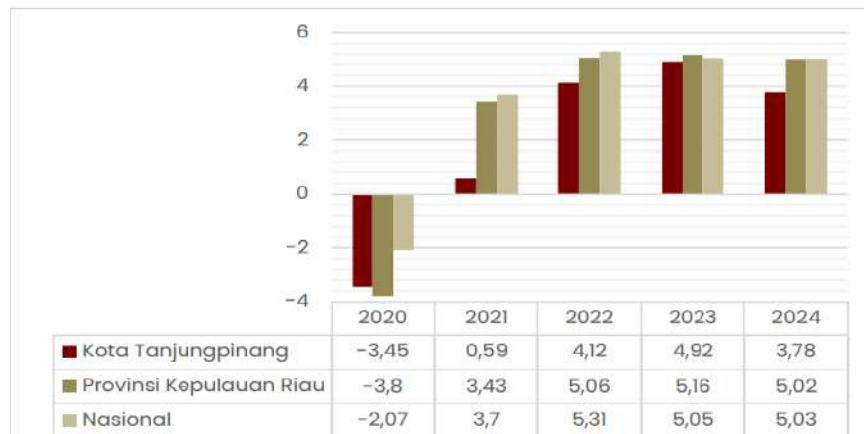
No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	138,23	142,04	152,45	158,56	163,49
2	Pertambangan dan Penggalian	3,39	3,10	3,28	3,00	2,87
3	Industri Pengolahan	1.304,99	1.343,09	1.434,62	1.520,70	1.561,52
4	Pengadaan Listrik dan Gas	39,22	39,32	41,07	45,45	49,95
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Konstruksi	13,49	14,79	15,25	16,55	16,91
6	Konstruksi	5.557,15	5.715,77	5.917,34	6.061,78	6.090,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	5.702,93	6.019,25	6.685,29	7.322,06	8.132,15
8	Transportasi dan Pergudangan	837,97	775,16	1.062,83	1.219,09	1.344,38
9	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	214,00	218,98	300,99	368,76	396,42
10	Informasi dan Komunikasi	623,25	641,71	671,20	748,58	810,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	661,73	671,28	718,20	718,67	832,09
12	Real Estate	634,16	640,29	672,66	749,53	803,57
13	Jasa Perusahaan	2,56	2,59	2,82	3,27	3,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	2.223,44	2.190,81	2.327,02	2.629,35	2.788,01

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
15	Jasa Pendidikan	908,54	948,51	998,43	1.044,69	1.074,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	491,95	526,37	547,64	585,64	633,12
17	Jasa Lainnya	208,01	206,33	241,39	274,98	317,36
PDRB		19.655,01	20.099,37	21.792,47	23.533,66	25.021,53

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, yang salah satu indikator utamanya tercermin dari tingkat pendapatan per kapita. Secara nominal, tingkat pendapatan per kapita di Kota Tanjungpinang masih tergolong lebih rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan per kapita di Provinsi Kepulauan Riau maupun dengan rata-rata pada tingkat Nasional. Menurut Sarpina et al. (2021) kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendapatan masyarakat Kota Tanjungpinang masih relatif rendah jika dibandingkan dengan wilayah lain.

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Tanjungpinang 2020-2024



Sumber: Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029

Dinamika pertumbuhannya, kinerja pendapatan per kapita Kota Tanjungpinang menunjukkan kecenderungan yang relatif tertinggal. Berdasarkan data periode 2020-2024 sebagaimana terlihat pada gambar 1.1, laju pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang secara konsisten di bawah capaian Provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional. Pada periode pemulihan setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi di tingkat Nasional maupun di Kepulauan Riau mampu berada pada kisaran 5%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Tanjungpinang hanya mencapai titik tertinggi sekitar 4,92% pada tahun 2023, sebelum kemudian mengalami perlambatan menjadi 3,78% pada tahun 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan per kapita Kota Tanjungpinang masih relatif rendah, sehingga peningkatan kesejahteraan ekonomi yang terjadi belum berlangsung secara dinamis maupun berkelanjutan. Menurut Putri & Anggraini (2024) pertumbuhan kesejahteraan yang relatif lebih lambat tersebut juga disertai dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau meskipun masih di bawah rata-rata

Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi di Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya tersebar secara merata di berbagai lapisan masyarakat. Terbatasnya peningkatan kesejahteraan ekonomi tersebut juga berkaitan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tingkat provinsi maupun nasional.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tanjungpinang dari tahun 2020-2024 didominasi oleh sektor jasa, dan dinamika pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa tidak seluruh sektor unggulan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor konstruksi dan administrasi pemerintahan menunjukkan peningkatan, sementara kontribusi sektor berbasis potensi sumber daya lokal relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor produktif berbasis potensi lokal guna memperluas sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengingat secara geografis Kota Tanjungpinang dikelilingi oleh wilayah perairan, sektor kelautan dan perikanan memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Menurut Inanda & Rivai (2025) dalam kerangka pembangunan regional, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh kinerja sektor-sektor pembentuknya yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Ketidakseimbangan antar sektor, khususnya melemahnya sektor primer dapat mengurangi daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sektor primer Kota Tanjungpinang menunjukkan kontribusi dan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah.

Pada akhirnya, situasi tersebut dapat melemahkan ketahanan ekonomi lokal serta membatasi peluang peningkatan pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut (Alfian & Mardiana, 2024). Sektor kelautan dan perikanan tetap memiliki posisi yang strategis meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih relatif kecil, yaitu kurang dari 1%. Nilai PDRB pada sektor pertanian dan perikanan tercatat mengalami peningkatan dari Rp 138,23 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 163,49 miliar pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor tersebut terus mengalami perkembangan yang cukup stabil, meskipun kontribusinya dalam struktur perekonomian daerah masih tergolong terbatas.

Peningkatan produksi tersebut menunjukkan bahwa subsektor perikanan memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor pendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang. Selain memberikan kontribusi terhadap perekonomian, sektor ini juga berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan serta menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang yang masih berada di bawah capaian tingkat provinsi maupun nasional menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah belum terbentuk secara kuat dan seimbang. Ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor jasa, sementara sektor primer masih berkontribusi kecil dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan (Noeridha & Nadia, 2023).

Menurut Samin & Akhyari (2022) sejalan dengan kebutuhan tersebut, kebijakan riset dan inovasi memiliki peran strategis sebagai instrumen pengungkit dalam memperkuat struktur ekonomi daerah, khususnya dalam pengembangan ekonomi berbasis maritim yang menjadi keunggulan komparatif Kota Tanjungpinang. Melalui perumusan dan implementasi kebijakan riset dan inovasi yang efektif, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pengetahuan, teknologi, serta model pengelolaan yang aplikatif guna meningkatkan produktivitas sektor primer, memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan (Lubis et al., 2024). Pengembangan ekonomi yang bertumpu pada sektor maritim di Kota Tanjungpinang hingga saat ini belum sepenuhnya didukung oleh sistem riset dan inovasi yang terintegrasi secara optimal dengan kebutuhan masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil kajian literatur, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis maritim di Indonesia masih menghadapi beragam permasalahan. Penelitian yang dilakukan oleh Lindiawatie (2025), mengungkapkan bahwa pelaksanaan kebijakan Tol Laut belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola, koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Melinda & Mokodompit (2025) menjelaskan bahwa pengembangan potensi maritim di Sulawesi Tenggara belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya sinergi kebijakan dan pengelolaan sumber daya maritim. Mas'adah et

al. (2026) menemukan bahwa, pengembangan wisata maritim berbasis potensi lokal di Kabupaten Lamongan belum optimal akibat lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta belum terintegrasinya pengelolaan wisata.

Berdasarkan temuan masalah tersebut, pengembangan ekonomi maritim masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan, keterbatasan infrastruktur, serta tata kelola pembangunan yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor maritim memerlukan dukungan kebijakan yang mampu memperkuat kolaborasi antar pihak terkait. Penelitian ini difokuskan pada analisis keterlibatan pemangku kepentingan kebijakan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah berbasis maritim. Kajian ini menegaskan pentingnya kebijakan riset dan inovasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing sektor maritim, menciptakan nilai tambah ekonomi, serta mendorong pemanfaatan potensi kelautan secara berkelanjutan.

Kesenjangan penelitian muncul karena belum terdapat kajian empiris yang secara khusus, menganalisis bagaimana keterlibatan antar pemangku kepentingan berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis maritim sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menelaah kontribusi para pemangku kepentingan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi maritim Kota Tanjungpinang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan dalam pengembangan ekonomi berbasis maritim di

Kota Tanjungpinang tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan regulasi dan potensi sumber daya alam, tetapi juga menyangkut kualitas tata kelola implementasi tingkat daerah. Keterlibatan antar pemangku kepentingan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan kebijakan riset dan inovasi dalam pengembangan ekonomi berbasis maritim Kota Tanjungpinang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan pemangku kepentingan kebijakan riset dan inovasi dalam pengembangan ekonomi berbasis maritim Kota Tanjungpinang?”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya terkait analisis pemangku kepentingan dalam kebijakan riset dan inovasi pada sektor maritim Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterlibatan berbagai aktor dalam upaya pengembangan ekonomi Kota Tanjungpinang.

1.4.1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi pemerintah Kota Tanjungpinang, dalam menyempurnakan proses perumusan kebijakan riset dan inovasi agar lebih inklusif serta mendorong kolaborasi dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis maritim. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan seperti pelaku usaha perikanan, dan perguruan tinggi untuk memperkuat koordinasi serta keterlibatan masing-masing dalam proses perencanaan pembangunan maritim di Kota Tanjungpinang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai pedoman agar pembahasan dapat tersusun secara terarah, sistematis, dan mudah dipahami. Penelitian ini terdiri atas lima bab yang saling berkaitan dalam menjelaskan analisis pemangku kepentingan kebijakan riset dan inovasi dalam pengembangan ekonomi berbasis maritim di Kota Tanjungpinang.

BAB 1 Pendahuluan memuat uraian, mengenai kondisi dan permasalahan yang melatarbelakangi pentingnya pengembangan ekonomi berbasis maritim di Kota Tanjungpinang melalui kebijakan riset dan inovasi daerah. Pada bab ini dijelaskan fenomena penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta susunan penulisan yang digunakan dalam penelitian.

BAB 2 Kajian Pustaka berisi landasan teoritis dan konseptual yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Pembahasan dalam bab ini

meliputi teori kebijakan publik, teori *stakeholder salience*, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta definisi konsep yang berkaitan dengan kekuasaan, legitimasi, urgensi, dan pengembangan ekonomi berbasis maritim.

BAB 3 Metode Penelitian menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan beserta tahapan pelaksanaannya. Pada bab ini diuraikan mengenai pendekatan penelitian, objek dan lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penentuan informan, teknik analisis data, serta jadwal penelitian yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

BAB 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil temuan penelitian di lapangan mengenai keterlibatan para pemangku kepentingan dalam kebijakan riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis maritim di Kota Tanjungpinang. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis berdasarkan teori dan konsep yang digunakan sehingga dapat diketahui bentuk keterlibatan, kekuasaan, legitimasi, serta urgensi masing-masing aktor dalam pelaksanaan kebijakan.

BAB 5 Penutup berisi kesimpulan, yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang diberikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah. Maupun pihak terkait dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi guna mendukung pengembangan ekonomi berbasis maritim di Kota Tanjungpinang secara berkelanjutan.